

# BPKH *News*

**Mahar Nikah  
Daftar Haji**  
Hal 11

**Investasi Untuk  
Milenial : Perspektif  
Prita Ghozie, Financial  
Planner Terkemuka**  
Hal 7



GATE 2025

4,4 TRILIUN RUPIAH



## **BPKH 2025 : BIDIK 4,4 TRILIUN RUPIAH UNTUK NILAI MANFAAT JEMAAH HAJI TUNGGU**

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji agar semakin akuntabel, transparan, dan efisien. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan umat Islam dalam pengelolaan dana haji,”



Segenap Insan Badan Pengelola Keuangan Haji  
Mengucapkan

*Selamat*  
atas pelantikan  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**  
Republik Indonesia Periode 2024-2029

**Prabowo Subianto**  
Presiden Republik Indonesia

**Gibran Rakabuming Raka**  
Wakil Presiden Republik Indonesia





#### PELINDUNG

Fadlul Imansyah,  
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI  
Ahmad Zaky,  
Sekretaris Badan BPKH RI

#### PENANGGUNG JAWAB

Nurul Qoyimah,  
Kepala Divisi Humas dan Administrasi  
Kantor BPKH RI

#### PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,  
Manajer Komunikasi dan Humas BPKH RI

#### STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

#### ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15  
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,  
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940

# MEMPERKUAT PENGELOLAAN DANA HAJI YANG TRANSPARAN DAN BERKEADILAN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang besar, kami sampaikan salam hangat kepada seluruh pembaca *e-magazine* BPKH. Sepanjang tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat komitmen dalam mengelola dana haji dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas publik. Kami bangga dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum dan keadilan dalam pengelolaan dana haji.

Dalam kerja sama kami dengan Universitas Andalas melalui seminar nasional, kami mendiskusikan isu-isu penting terkait investasi keuangan haji, terutama dalam rangka merespons Fatwa *Ijtima'* Ulama VIII. Ini menjadi landasan bagi BPKH untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi seluruh jemaah.

Selain itu, kami terus mendorong peningkatan distribusi manfaat bagi jemaah, baik yang telah berangkat maupun yang masih menunggu. Salah satu pencapaian kami di tahun ini adalah penyaluran Rp1,2 triliun nilai manfaat kepada jemaah tunggu melalui *virtual account*. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami menuju sistem pembiayaan haji yang mandiri, di mana kami berharap seluruh dana haji dapat dikelola secara lebih efisien dan transparan.

Kami juga terus berinovasi melalui BPKH Haji Run 2024 yang akan digelar di Padang, Sumatra Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye *#AyoHajiMuda* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam merencanakan haji sejak dini. Kami berharap, melalui acara ini, semakin banyak masyarakat yang mempersiapkan ibadah haji lebih awal, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka akan pentingnya perencanaan keuangan haji.

Tidak kalah penting, kami juga hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan melalui program tanggap darurat gempa di Kabupaten Bandung. Kolaborasi kami dengan Rumah Zakat dalam menyalurkan bantuan untuk ribuan penerima manfaat adalah wujud nyata kepedulian BPKH terhadap sesama.

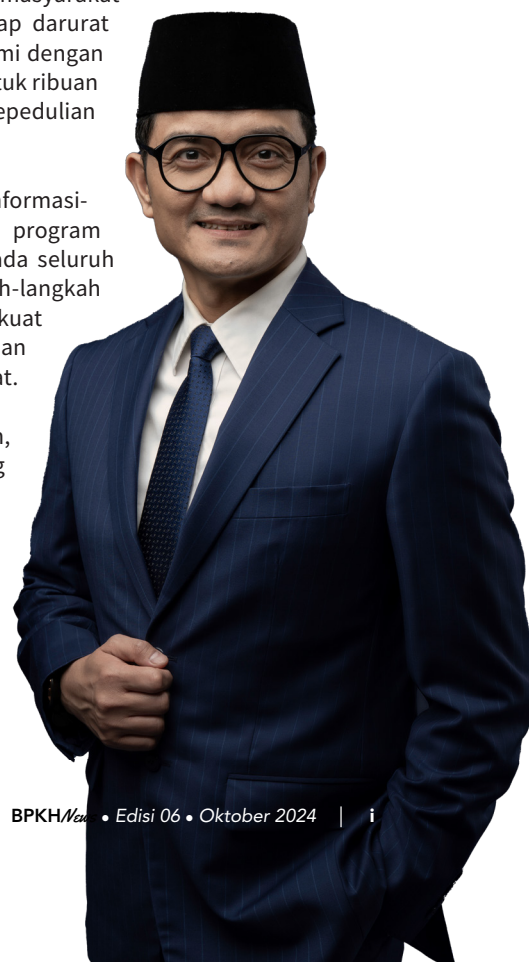
Melalui *e-magazine* ini, kami berharap informasi-informasi strategis seputar kinerja dan program BPKH dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan. Semoga langkah-langkah yang telah kami tempuh semakin memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga BPKH terus menjadi lembaga yang amanah dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

*Fadlul Imansyah*

Kepala Badan Pelaksana  
Badan Pengelola Keuangan Haji







# 3

## BPKH 2025 : BIDIK 4,4 TRILIUN RUPIAH UNTUK NILAI MANFAAT JEMAAH HAJI TUNGGU

*“Dengan bertambahnya nilai manfaat di akun virtual, beban setoran pelunasan jemaah nantinya bisa dikurangi seiring berjalannya waktu. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada setoran awal jemaah yang selama ini banyak digunakan untuk biaya penyelenggaraan haji berjalan”*



## TANTANGAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM INVESTASI DANA HAJI

# 1



## TINGKATKAN LAYANAN TRANSPORTASI HAJI & UMROH, BPKH LIMITED SIAPKAN ARMADA BUS DI TANAH SUCI

# 2





7

**INVESTASI UNTUK MILENIAL:  
PERSPEKTIF PRITA GHOZIE,  
FINANCIAL PLANNER  
TERKEMUKA**



13

**MEWUJUDKAN  
CAPITAL  
INFLOWS HAJI &  
UMROH**



9

**MENIKAH**

**Ibadah Terpanjang dalam  
Kehidupan**



11

**MAHAR NIKAH  
DAFTAR HAJI**



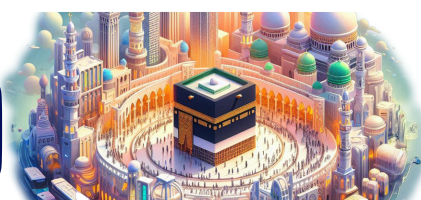
17

**KOLABORASI  
BPKH & RUMAH  
ZAKAT**



18

**MENGELOLA KEUANGAN HAJI  
DENGAN PRINSIP SYARIAH  
DAN MANFAAT MAKSIMAL**



19

**HAJI & UMROH PREMIUM  
HANYA UNTUK ORANG KAYA?**



# TANTANGAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM INVESTASI DANA HAJI

**B**adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi dengan Universitas Andalas (Unand) dalam Seminar Nasional bertema “Investasi Keuangan Haji oleh BPKH: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Jemaah Haji dalam Bingkai Keputusan Ijtima’ Ulama”, Kamis (26/9/2024).

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, kegiatan seminar bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan haji yang semakin menjadi sorotan. Utamanya, setelah dikeluarkannya Fatwa Ijtima’ Ulama VIII yang menyatakan pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal calon jemaah haji untuk membiayai jemaah lain adalah haram.

“Fatwa ini menjadi tantangan baru bagi BPKH, mengingat BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji secara transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi regulasi nasional,” kata Fadlul seperti dikutip dari siaran

pers, Sabtu (28/9/2024).

Fadlul menjelaskan, Fatwa Ijtima’ Ulama VIII merekomendasikan agar adanya perbaikan tata kelola keuangan haji pada Undang-Undang dan menjadikan fatwa sebagai panduan dalam mengelola dana haji di masa depan.

“Sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola dana haji, BPKH menyadari pentingnya mengadopsi rekomendasi ini sambil tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Fadlul.

Fadlul berharap, Revisi terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang diupayakan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi jemaah haji.

“Kami akan menjadikan fatwa ini sebagai salah satu referensi utama dalam perbaikan tata kelola

dana haji, sambil terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Fadlul juga menegaskan komitmen BPKH untuk meningkatkan distribusi manfaat investasi kepada para jemaah haji. Dalam pendapat hukumnya, ia menegaskan bahwa fatwa ini memiliki nilai moral yang besar.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPKH akan mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian hasil investasi dana haji dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi jemaah haji.

“BPKH juga akan mendorong adanya revisi regulasi yang dapat melindungi hak-hak jemaah haji, memastikan keamanan dana mereka, serta menghindari praktik-praktik keuangan yang merugikan,” kata dia.





# TINGKATKAN LAYANAN TRANSPORTASI HAJI & UMROH, BPKH LIMITED SIAPKAN ARMADA BUS DI TANAH SUCI



**A**nak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, BPKH Limited, mulai melakukan ekspansi usahanya ke bidang transportasi darat dengan menyediakan armada bus baru untuk melayani jemaah haji dan umrah di Tanah Suci. Untuk mengoperasikan bus, BPKH Limited bekerja sama dengan 3 (tiga) syarikah transportasi yang telah memiliki izin lengkap dari otoritas pemerintah Saudi.

Rencana kerja sama dengan Syarikah Kayyan, Syarikah Huda Al-Hijaz, dan Syarikah Shaqadif ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh para pihak pada acara pembukaan Expo Amazing Indonesia yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kamis 26 September 2024 di Gedung Al-Mutlaq Jeddah Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini BPKH Limited akan berinvestasi dengan membeli sejumlah armada bus baru selanjutnya BPKH Limited bekerja sama dengan syarikah

operator bus yang sudah terdaftar sebagai anggota Naqabah untuk melayani Jemaah haji dan umrah dengan rute Makkah, Armuzna, Madinah, dan Jeddah. Untuk menjaga tingkat okupansi bus, BPKH Limited juga bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara haji dan umrah dan juga dengan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) maupun Perusahaan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Kami mulai berinvestasi di sektor transportasi darat untuk mengoptimalkan khidmat kami kepada Jemaah haji dan umrah. Kami ingin memberikan service terbaik dengan armada bus terbaru dan pengemudi yang berasal dari Indonesia sehingga membuat Jemaah semakin nyaman di perjalanan selama di Tanah Suci.” Jelas Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited, setelah penandatanganan MoU antara BPKH dan beberapa perusahaan transportasi.

Joko Asmoro, salah satu penggerak asosiasi penyelenggara

haji dan umrah, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung inisiatif bisnis BPKH Limited, “Kami dengan senang hati akan menggunakan bus dari BPKH Limited untuk para jemaah umrah dan haji khusus, dengan harapan harga terjangkau dan dengan kualitas bus baru yang prima. Apalagi keuntungan BPKH Limited akan kembali kepada Jemaah haji juga.”

Sidiq mengatakan bahwa pihaknya sedang intens berkomunikasi dengan Perum DAMRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpengalaman sebagai operator bus untuk berkolaborasi dalam melayani transportasi Jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. “Kami ingin semua elemen merah putih dapat berkolaborasi dalam melayani Jemaah Indonesia dan bersama-sama mendapatkan manfaat dan berkah di Tanah Suci.” pungkash Sidiq.

# BPKH 2025 : BIDIK 4,4 TRILIUN RUPIAH UNTUK NILAI MANFAAT JEMAAH HAJI TUNGGU

*“Dengan bertambahnya nilai manfaat di akun virtual, beban setoran pelunasan jemaah nantinya bisa dikurangi seiring berjalannya waktu. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada setoran awal jemaah yang selama ini banyak digunakan untuk biaya penyelenggaraan haji berjalan”*

**B**adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan peningkatan distribusi nilai manfaat bagi jemaah haji yang masih berada dalam antrean tunggu, dengan nilai yang mencapai Rp4,4 triliun pada tahun 2025. Rencana ini dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. Langkah strategis ini, yang hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, diambil untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi jemaah haji dan mengurangi ketergantungan pada biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) melalui mekanisme mandiri atau *self-financing*.

## Kenaikan Dana Kelolaan untuk Keberlanjutan Pengelolaan Haji

Dalam RKAT 2025, BPKH menetapkan target peningkatan total dana kelolaan sebesar 11%. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui proyeksi kenaikan jumlah pendaftar haji sebesar 9,6% dan pengelolaan investasi yang optimal, dengan asumsi peningkatan imbal hasil minimal 5% per tahun. Upaya tersebut juga mencakup kenaikan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji sebesar 12%, serta alokasi distribusi Virtual Account (VA) bagi jemaah haji tunggu hingga mencapai 91,3% lebih tinggi dari tahun lalu.



“Kami memproyeksikan distribusi manfaat yang lebih besar bagi jemaah haji yang masih menunggu melalui berbagai instrumen investasi yang kami kelola secara aman,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah. Menurut Fadlul, pencapaian ini akan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji sekaligus membantu mengurangi beban biaya perjalanan melalui pembagian nilai manfaat yang terakumulasi dalam virtual account jemaah.

Nilai manfaat yang disalurkan kepada jemaah tunggu ini didanai dari pengembangan dana haji yang dilakukan BPKH melalui bank syariah dan instrumen investasi yang aman, di antaranya melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), investasi emas, dan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **Peningkatan Alokasi *Virtual Account* dan Mendukung Sistem *Self-Financing***

BPKH mulai menyalurkan nilai manfaat bagi jemaah tunggu secara proporsional sejak tahun 2018 melalui virtual account masing-masing jemaah. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi BPKH untuk mendorong *self-financing* pada dana haji, di mana nantinya nilai manfaat ini dapat digunakan untuk mengurangi setoran pelunasan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah. Dengan begitu, jemaah hanya perlu memeriksa saldo VA mereka ketika biaya haji diumumkan, sementara saldo tersebut dapat dikurangi dari biaya akhir yang harus dibayarkan.

“Dengan bertambahnya nilai manfaat di akun virtual, beban setoran pelunasan jemaah nantinya bisa dikurangi seiring berjalannya waktu. Ini merupakan salah satu cara

untuk mengurangi ketergantungan pada setoran awal jemaah yang selama ini banyak digunakan untuk biaya penyelenggaraan haji berjalan,” ungkap Fadlul.

BPKH juga berharap langkah ini dapat mempercepat upaya *self-financing* bagi jemaah haji di masa mendatang, di mana setiap jemaah dapat menggunakan saldo manfaatnya secara langsung untuk menutup sebagian biaya haji. Melalui skema ini, BPKH menargetkan akumulasi nilai manfaat yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi setiap calon jemaah haji.

### **Strategi Diversifikasi Investasi Syariah dan Lindung Nilai (*Hedging*)**

BPKH telah menyusun strategi diversifikasi investasi yang inovatif untuk memastikan nilai manfaat dana haji terus tumbuh dan stabil. Salah satu fokus utama adalah memperluas portofolio investasi melalui instrumen berbasis syariah yang memberikan imbal hasil optimal, di antaranya SBSN yang diterbitkan pemerintah dan berbagai surat berharga syariah dari Bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan OJK. Selain itu, investasi emas dipilih sebagai upaya lindung nilai (*hedging*) guna melindungi nilai dana dari inflasi dan volatilitas pasar yang tetap mengikuti prinsip syariah.

Dalam penerapannya, BPKH melakukan investasi melalui mekanisme lelang yang kompetitif untuk memperoleh hasil yang optimal. “Kami berusaha untuk memastikan dana kelolaan jemaah dikelola secara aman dan memberikan manfaat yang optimal,” tambah Fadlul. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BPKH untuk menjadikan dana haji sebagai instrumen yang menguntungkan bagi seluruh jemaah, baik yang masih dalam antrean tunggu maupun yang sudah dijadwalkan berangkat.



# Perolehan Nilai Manfaat & Data Distribusi Nilai Manfaat Kepada Jemaah

Selain digunakan untuk penyelenggaraan haji, nilai manfaat juga dibagikan kepada jemaah haji tunggu yang dapat di cek melalui aplikasi BPKH VA.



## Digitalisasi Pengelolaan Dana Haji melalui Aplikasi BPKH VA

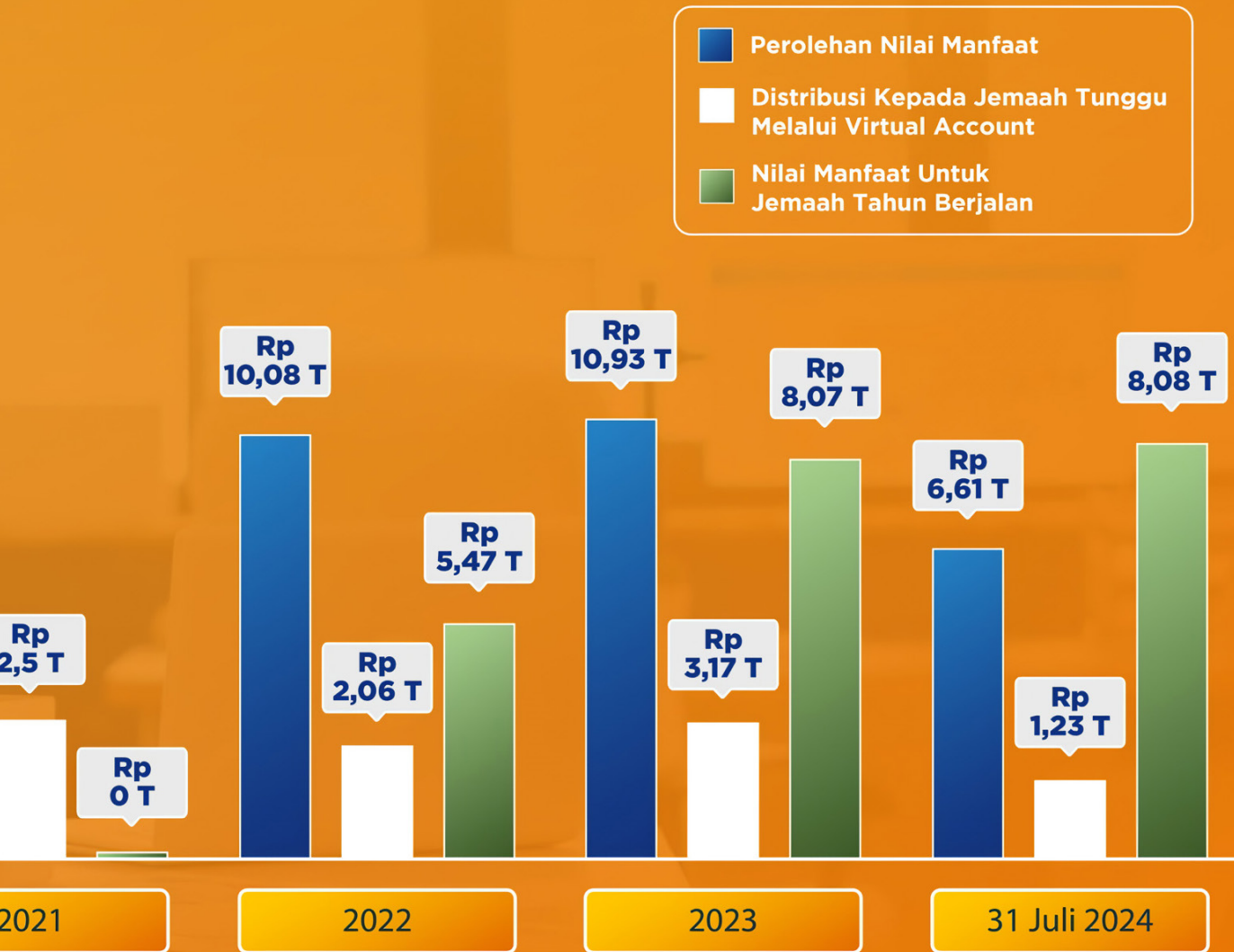
Untuk memastikan transparansi pengelolaan dana haji, BPKH telah mengembangkan aplikasi BPKH VA yang memungkinkan jemaah mengakses informasi saldo dan nilai manfaat mereka secara *real-time*. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di *Google Play Store* dan *Apple App Store*. Fadlul menekankan pentingnya aplikasi ini sebagai jembatan antara BPKH dan jemaah haji untuk memudahkan pemantauan nilai manfaat dan saldo *virtual account*, sehingga setiap jemaah dapat melihat langsung hasil pengelolaan dana mereka.

Pada semester pertama tahun 2024, BPKH telah menyalurkan total nilai manfaat ekuivalen Rp1,23 triliun kepada jemaah tunggu, dengan rincian sebesar USD10,5 juta untuk jemaah haji khusus dan Rp1,06 triliun untuk jemaah haji reguler. Melalui aplikasi ini, jemaah juga bisa memperoleh informasi terbaru mengenai pengelolaan dana haji, memantau saldo *virtual account* mereka, serta memanfaatkan kemudahan layanan digital lainnya.

## Komitmen Jangka Panjang dan Dukungan Stakeholder

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa peningkatan nilai manfaat bagi





jemaah tunggu merupakan komitmen jangka panjang BPKH untuk memberikan layanan optimal bagi jemaah haji Indonesia. Dengan dukungan kebijakan dari berbagai pihak terkait, termasuk regulasi yang memadai, BPKH berharap dapat terus memajukan ekosistem pengelolaan dana haji di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik.

Peningkatan nilai manfaat melalui alokasi VA yang lebih besar, diversifikasi investasi syariah, serta pengembangan layanan digital menjadi bukti konkret upaya BPKH untuk mewujudkan dana haji yang aman, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.

“Dukungan dari berbagai *stakeholder* menjadi penting agar rencana dan strategi BPKH ini dapat berjalan sesuai harapan. Kami optimis bahwa setiap dana yang disetorkan oleh jemaah akan dikelola dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi untuk menghasilkan manfaat maksimal,” tutup Fadlul.

# INVESTASI UNTUK MILENIAL: PERSPEKTIF PRITA GHOZIE, FINANCIAL PLANNER TERKEMUKA

**S**aat ini, investasi menjadi topik hangat, terutama di kalangan milenial yang lebih tertarik pada pengalaman dibandingkan akumulasi aset tradisional seperti rumah atau kendaraan.

Namun, di tengah tren ini, ada sebagian milenial yang mulai mempertimbangkan investasi jangka panjang sebagai upaya mengamankan masa depan mereka. Menurut Prita Ghozie, seorang

*Financial Planner, Financial Educator,* dan dosen, Investasi adalah tentang pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk persiapan dana darurat, pendidikan, dan bahkan perjalanan haji.

Prita menekankan, “Investasi bukan hanya menunda konsumsi saat ini untuk keuntungan di masa depan, tapi juga mengelola modal agar berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup kita nanti.”

## **Mengapa Milenial Perlu**

### **Berinvestasi?**

Bagi Prita, tantangan terbesar yang dihadapi generasi milenial dalam berinvestasi adalah adanya fenomena sosial yang lebih mengutamakan gaya hidup konsumtif.

Status sosial saat ini tak lagi diukur melalui kepemilikan rumah atau mobil, namun melalui pengalaman, seperti *traveling*. “Kepemilikan



aset milenial, terutama rumah, memang cenderung menurun dibanding generasi sebelumnya, tetapi 30% milenial sudah memiliki rumah sendiri, dan 50% lainnya tertarik untuk membeli properti di masa depan,” ungkap Prita, mengutip data survei terbaru.

### Memulai Investasi dari Usia Muda

Prita berbagi pengalamannya yang mulai memahami pentingnya investasi sejak usia sekolah. Ia mengingatkan bahwa investasi sebaiknya dimulai sedini mungkin, bahkan dari bangku sekolah. Dengan adanya produk-produk investasi yang dapat dimulai dengan modal kecil, seperti reksadana yang kini bisa diakses mulai dari Rp 20.000, investasi menjadi semakin mudah dijangkau.

Prita juga menyarankan milenial untuk memperhatikan kekuatan finansial pribadi terlebih dahulu, dengan memastikan dana darurat yang cukup. Dana darurat, menurutnya, adalah landasan penting agar seseorang bisa menahan diri dari kebiasaan konsumtif dan fokus pada tujuan jangka panjang.

### Financial Literacy dan Generasi Sandwich

Fenomena “generasi *sandwich*” di Indonesia, di mana seseorang menanggung beban finansial keluarga ke atas dan ke bawah, juga menjadi perhatian Prita.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan keuangan yang matang agar generasi ini bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan investasi pribadi. “Sebagai orang beriman, kita harus memiliki kekuatan baik dari sisi kesehatan maupun keuangan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah,” tambah Prita.

### Menuju Masa Depan dengan Investasi

Untuk generasi milenial yang mendambakan stabilitas finansial di masa depan, terutama untuk persiapan dana haji, langkah awal

dimulai dari memperkuat pondasi finansial. Dengan mengelola arus kas, membentuk dana darurat, dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk berinvestasi, milenial dapat merencanakan masa depan yang lebih mapan.

Prita menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dalam investasi adalah kesabaran dan konsistensi. “Investasi bukan tentang keuntungan instan, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati hasilnya di masa depan,” ujarnya.

## Prita Hapsari Ghozie, SE, MCom, GCertFP

**UNIVERSITAS INDONESIA (Sarjana, Ekonomi)**  
1998 - 2002

**UNIVERSITY OF SYDNEY (Master of Commerce)**  
2002 - 2003

**IBM**  
**2004 - 2009**  
- TEAM BLUE TRAINEE  
- P-SERIES SALES SPECIALIST  
- COUNTRY TREASURY ANALYST

**ZAP FINANCE**  
**2009 - Sekarang**  
- CHIEF PLANNER  
- CHIEF EXECUTIVE OFFICER

# MENIKAH

## Ibadah Terpanjang dalam Kehidupan

**P**ernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam sebuah podcast menarik yang diunggah di *YouTube* oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tema pernikahan dibahas dengan mendalam, mengungkapkan berbagai aspek yang perlu dipahami oleh kaum muda dalam mempersiapkan diri untuk membina rumah tangga.

Berbeda dengan beragam ibadah lainnya seperti sholat yang hanya membutuhkan waktu lima menit, atau puasa yang dilakukan selama 30 hari, pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang di dalamnya tersimpan berbagai tantangan dan kebahagiaan.

Dalam sebuah *podcast* yang disiarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, tema pernikahan dibahas secara mendalam oleh Mamah Dedeh, menggugah pemikiran tentang dinamika yang dihadapi oleh kaum muda dalam mempersiapkan diri untuk menikah.

menikah, terutama bagi mereka yang mampu.

“Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya,” demikian sabda beliau, menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang tidak hanya mengikat dua hati, tetapi juga menjadi ladang pahala yang luas.

### Tantangan Kaum Muda dalam Menikah

Namun, di tengah keindahan pernikahan, banyak kaum muda yang merasa cemas dan takut ketika berpikir untuk menikah. Ada berbagai faktor yang menyumbang ketakutan tersebut, seperti tanggung jawab menjaga anak perempuan orang, biaya pernikahan yang sering kali dianggap terlalu tinggi, dan juga tekanan dari lingkungan sekitar.

Ketakutan kaum muda dalam menghadapi pernikahan seringkali dipengaruhi oleh faktor tanggung jawab, tekanan finansial, dan harapan lingkungan.

Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA menyebutkan bahwa wanita dinikahi karena harta, keturunan, kecantikan, dan

Rasulullah saw. menyebutkan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah. Beliau menekankan pentingnya

agama, tetapi yang paling utama adalah agama.





Menikah dengan niat untuk menjalankan sunnah dan beribadah kepada Allah akan membawa keberkahan, sementara kekhawatiran seperti biaya dan tanggung jawab akan Allah memudahkan jika dilakukan dengan niat yang benar.

Dalam menghadapi tekanan lingkungan dan rasa takut akan tanggung jawab, Islam mengajarkan untuk berusaha dan bertawakal. Selama ada keinginan untuk belajar dan berusaha menjaga keluarga sesuai syariat, Allah akan memberikan kemudahan.

### Meluruskan Hal-hal yang dilarang Agama dalam Pernikahan

Salah satu anggapan yang perlu dikoreksi adalah pandangan bahwa suami mempunyai hak untuk memukul istri jika tidak menurut. Mamah Dedeh menekankan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru. Dalam ajaran Islam, tindakan tersebut tidak dibenarkan jika menyakiti. Rasulullah memberikan tiga langkah dalam menegur istri yang dianggap tidak menaati, yaitu memberi nasihat baik-baik, melakukan pisah ranjang, dan jika perlu, memberikan ‘pukulan’ yang tinjauan maknanya lebih pada pendekatan yang penuh kasih, seperti menggunakan siwak, bukan berarti dengan niat mencederai.

Secara jelas Al-Qur’an menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِهُمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya, “Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan (tidak memenuhi hak suami), maka nasehatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka.” (Surat An-Nisa’ ayat 34).

### Membangun Pernikahan yang Harmonis

Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah mengingatkan agar memilih pasangan yang baik harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama agama. “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar

mengutamakan fisik atau materi, tetapi perlu landasan spiritual yang kuat agar kedamaian dan kebahagiaan dapat dicapai.

Bagi mereka yang merasakan kendala biaya, penting untuk diingat bahwa rukun nikah hanya memerlukan kelima elemen: mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan dukungan dari masyarakat. Dengan tujuan yang jelas dan komitmen yang kuat, banyak pasangan dapat menemukan jalan untuk mewujudkan pernikahan yang sakral ini.

### Komitmen dalam Pernikahan

Menikah adalah tentang komitmen dan tanggung jawab. Ketakutan terhadap tanggung jawab menjaga anak perempuan orang dapat diatasi dengan persiapan mental dan emosional yang matang. Semua aspek pernikahan dapat dipelajari, dan selama ada kemauan untuk menjalani pernikahan dengan baik, segala jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga sangat terbuka.

Kunci utama dari pernikahan yang langgeng adalah niat suci untuk beribadah kepada Allah. Ketika dua orang menikah dengan landasan cinta dan takut kepada Allah, maka hubungan itu diarahkan untuk saling menguatkan. Allah SWT yang menumbuhkan rasa sayang, insyaAllah akan mempertahankan hubungan itu meskipun menghadapi berbagai ujian.

Dengan adanya pemahaman yang benar tentang pernikahan, diharapkan kaum muda dapat meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang penuh berkah dan lara yang saling melengkapi.

# MAHAR NIKAH DAFTAR HAJI

**K**epala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengajak para generasi muda, utamanya calon mempelai pria untuk mulai menabung sejak dini agar bisa memberi mahar atau mas kawin kepada pasangannya berupa setoran awal haji.

“Ada satu hal yang menurut saya cukup fenomenal kalau kita lihat saat ini, dimana generasi muda yang sudah lulus kuliah itu sebagian besar pikirannya menikah selagi muda.

Nah, orang-orang menikah itu biasanya kan mahar dengan seperangkat alat sholat, sekarang diubah maharnya jadi setoran awal haji. Bisa dibayangkan kalau pasangan Indonesia sejak umur 25 tahun sudah berpikir untuk setor haji, berarti pola pikir mereka itu secara fisik dan rohani kan sudah bagus,” katanya di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan saat ini setoran awal minimal yang diperlukan untuk berangkat haji yakni Rp25 juta. Menurutnya, para generasi muda yang menyetorkan uangnya sebagai mahar untuk naik haji bisa memiliki karier dan rezeki yang lebih baik.

“Jadi kalau karier dan rezekinya baik, maka akhlaknya

juga baik. Jadi yang namanya tahun emas 2045 itu tercetus karena ayo haji muda, jadikan setoran awal haji menjadi mahar bagi perkawinan, mak bisa dibayangkan tahun 2045 bangsa ini akan sebegitu baiknya,” ujar dia.

Ia menjelaskan ada waktu tunggu yang lama untuk naik haji, rata-rata sekitar 20-30 tahun, karena terdapat sedikitnya 5,3 juta antrean yang menunggu untuk berangkat haji.

“Sementara kuota kita itu sekarang mungkin sekitar 200 ribuan, jadi kalau dihitung dari 5,3 juta dibagi dengan 200 ribu itu, sekitar 26-27 tahun menunggu, rata-ratanya sekitar 25-30 tahun menunggu. Jadi bisa dibayangkan, kalau selama ini orang naik haji itu pada saat mau pensiun, umur 55 atau 56 tambah 25 tahun aja itu

80 tahun baru berangkat haji,” tuturnya.

Sementara, Fadlul mengingatkan bahwa berangkat haji memerlukan fisik yang kuat karena harus banyak berjalan dengan jarak yang cukup jauh.

“Dia harus jalan dari Mina ke Arafah, kemudian





harus berada di tenda Mina sekian lama, wukuf di Arafah segala macam, itu kan kegiatan fisik. Hampir semuanya itu haji itu kegiatan fisik, oleh karena itu, kita mengimbau anak-anak muda, khususnya yang baru lulus kuliah di usia 25 tahun misalnya, untuk setor awal haji, sehingga di usia 50-60 tahun sudah bisa berangkat haji. Insyaallah orang-orang umur segitu fisiknya masih kuat untuk keliling, jalan jauh, dan sebagainya,” paparnya.

Ia juga menegaskan generasi muda tak perlu melihat nominal uang yang harus disetor setiap bulannya untuk menabung, tetapi lebih luas dari itu, yang terpenting adalah niat untuk menyettor awal haji sehingga akan terbuka jalan rezeki yang lebih besar.

“Jangan melihat itu (nominalnya), karena banyak kejadian, sekali kita meniatkan, misalnya setor anggaplah per bulan Rp1 juta, kan berarti 24 bulan bisa setoran awal, tetapi untuk menuju ke situ, sebenarnya yang lebih hebat adalah dalam

perjalanan itu, ada kekuatan Tuhan entah dari mana rezekinya siapa tahu sudah bisa diberangkatkan haji lebih awal lagi,” katanya.

Ia menekankan kampanye “Ayo Haji Muda” terus digencarkan oleh BPKH dengan tujuan agar ketika para jamaah haji itu berangkat, mereka bisa langsung melakukan haji tanpa mengalami kekhawatiran fisik.





# MEWUJUDKAN CAPITAL INFLOWS HAJI & UMRAH

Oleh : Fadlul Imansyah

**M**erujuk data terkini dari *World Population Review*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia dengan jumlah total 236 juta jiwa, atau sedikit di bawah Pakistan yang jumlahnya telah mencapai sekitar 240,8 juta jiwa akhir-akhir ini. Namun secara kuota haji, Indonesia saat ini masih merupakan negara yang mendapatkan porsi terbesar di dunia yaitu sebesar 241 ribu jemaah di tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah.

Seperti yang diketahui, kuota yang diberikan Kerajaan Saudi Arabia kepada Pemerintah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sempat turun 50% di tahun 2022 paska pandemi Covid-19 dibandingkan jumlah kuota 229 ribu jemaah pada tahun 2019, namun secara bertahap angka tersebut naik secara bertahap menjadi 231 ribu pada tahun 2023 hingga menjadi 241 ribu pada tahun 2024.

## Pengeluaran Haji dan Umrah

Peningkatan kuota ini tentunya diikuti oleh kenaikan besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan pemberangkatan jemaah haji setiap tahunnya. Tercatat sejak sebelum pandemi tahun 2019, total pengeluaran biaya penyelenggaraan ibadah (BPIH) sebesar Rp. 14,45 triliun. Nilai BPIH ini sempat turun menjadi hanya Rp. 9 triliun di tahun 2022 karena pemberangkatan haji saat itu hanya 50% dari kuota normal. Di tahun berikutnya, angkanya kembali bergerak naik masing-masing menjadi Rp.

18,25 triliun dan Rp. 20,32 triliun pada tahun 2023 dan 2024.

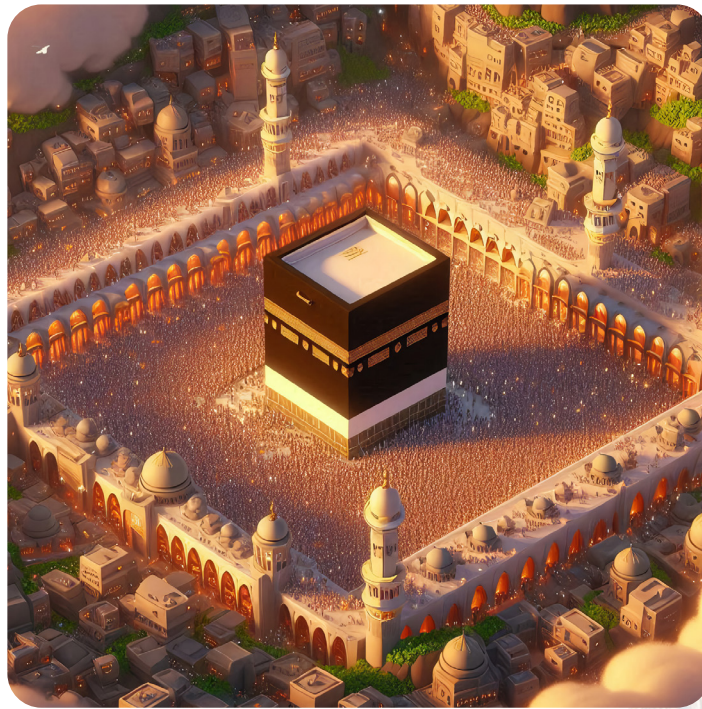
Beberapa tahun mendatang, total BPIH diproyeksikan meningkat terus meskipun tanpa asumsi adanya kenaikan kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi. Secara historis, beberapa faktor utama yang menjadi kontributor kenaikan BPIH antara lain tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan kenaikan

harga bahan bakar pesawat di luar faktor *demand* dan *supply* atas fasilitas-fasilitas haji di Mekkah dan Madinah.

Selain pengeluaran biaya haji, masyarakat Indonesia juga mengeluarkan total biaya umrah yang nilainya relatif cukup besar setiap tahunnya. Dengan asumsi rata-rata biaya umrah per orang Rp. 30 juta, aliran dana yang dikeluarkan bangsa ini dapat mencapai kurang

lebih Rp. 60 triliun per tahun. Nilai tersebut dihitung dengan jumlah rata-rata 2 juta orang per tahun yang berangkat umrah. Jika dijumlahkan total BPIH dan biaya umrah jemaah Indonesia selama 1 tahun maka nilai aliran dana yang keluar dari peredaran uang dalam negeri dapat mencapai kurang lebih Rp. 80 triliun.

Perhitungan ini belum termasuk rata-rata belanja makan dan oleh-oleh yang dihabiskan selama jemaah haji dan umrah Indonesia berada di sana. Kalau rata-rata belanja selama haji dan umrah sebesar Rp 5 juta per jemaah, maka ada tambahan lebih dari Rp.





10 triliun uang mengalir keluar dari sistem keuangan Indonesia. Jika demikian, maka bisa jadi hampir Rp. 100 triliun *capital outflows* dari Indonesia setiap tahunnya untuk aktivitas haji dan umrah.

Yang lebih menarik lagi adalah rencana penambahan kapasitas haji dan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi yang setiap tahunnya akan menjadi masing-masing total 4,5 juta jemaah untuk haji dan 30 juta jemaah umrah di tahun 2030. Hal ini sesuai dengan Visi Kerajaan Arab Saudi yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun terakhir. Sebagai informasi, saat ini jumlah kapasitas fasilitas yang tersedia bagi jemaah haji dan umrah masing-masing sebesar 2 juta dan 10 juta orang.

Artinya pada tahun 2030, jemaah haji dan umrah setiap negara di dunia rata-rata akan naik berkali lipat, termasuk Indonesia. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa sejak tahun 2030, maka akan terjadi *capital outflows* dari sistem keuangan Indonesia sebesar lebih dari Rp. 200 triliun per tahun.

Pertanyaan berikutnya adalah dari sekian banyak aliran dana yang keluar tersebut, berapa banyak pendapatan devisa yang dapat kembali ke Indonesia dalam berbagai bentuk input barang dan jasa?

### Potensi Investasi Ekosistem Haji dan Umrah

Sebagai pengelola keuangan haji di Indonesia, BPKH memiliki visi menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Melalui misi membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern, BPKH saat ini terus berupaya meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPHI melalui kerjasama strategis baik di dalam maupun luar negeri.

Hal ini tentu saja dilakukan dengan terus meningkatkan optimalisasi nilai imbal hasil investasi atau yang biasa disebut sebagai nilai manfaat sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas. Di luar dari pengelolaan investasi yang sudah berjalan melalui surat berharga syariah dan penempatan deposito di perbankan syariah, salah satu terobosan yang telah dilakukan sejak tahun 2023 adalah melalui pembentukan anak perusahaan di Arab Saudi yang bernama BPKH Limited.



Sebenarnya awal latar belakang didirikannya BPKH limited adalah untuk meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH sebagaimana yang tercantum pada UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing yang digunakan untuk membayar mayoritas BPIH dalam denominasi Saudi Real dan Dollar Amerika Serikat, investasi pada BPKH limited diharapkan juga dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang optimal.

Saat ini, anak usaha BPKH yang berdomisili di Jeddah dan Mekkah telah mendapatkan izin usaha yang bergerak di berbagai sektor dalam ekosistem haji dan umroh. Seiring dengan perjalanan waktu, BPKH limited ternyata juga berpotensi untuk ikut serta mengendalikan BPIH menjadi lebih efisien. Pada gilirannya, hal ini akan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pelayanan bagi calon jemaah haji Indonesia. Peluang untuk mewujudkan hal tersebut terbuka lebar ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerbitkan regulasi baru yang memungkinkan subjek hukum (orang atau badan hukum asing) boleh memiliki aset di dua kota suci umat muslim dunia. Regulasi ini juga memungkinkan kepemilikan abadi (*perpetual title*) atas tanah di Makkah dan Madinah untuk instansi atau warga asing apabila tanah tersebut dijadikan wakaf.

Beberapa *quick win* yang telah dilakukan sejak berdirinya anak perusahaan BPKH ini antara lain melakukan kerjasama sewa jangka pendek dan menengah dengan beberapa pengelola hotel di Arab Saudi. Adapun pengelolaan akomodasi yang telah dilakukan adalah masing-masing pada hotel berkapasitas 200 kamar di area dekat Masjidil Haram Mekkah dan 700 kamar di wilayah dekat Masjid Nabawi Madinah. Model bisnis akomodasi ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi BPKH untuk dapat mengembangkan peran usahanya dalam bidang akomodasi bagi ekosistem

haji yang lebih besar lagi ke depannya.

Tentu saja pengelolaan investasi pada akomodasi hotel in diharapkan akan menjadi prioritas BPKH Limited di masa-masa yang akan datang. Sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya akan menjadi konsumen sebagai jemaah haji dan umrah, namun juga dapat menikmati hasil investasi atas ekosistem perhajian yang dilakukan melalui pengelolaan dana setoran awal haji oleh BPKH. Secara teori,

kenaikan tingkat inflasi di dalam sistem ekonomi dapat diatasi melalui imbal hasil yang didapatkan dari kegiatan pengelolaan investasi atau yang dikenal sebagai *natural hedging*. Dengan demikian, nilai setoran awal calon jemaah haji yang dikelola BPKH tidak saja terlindungi dari kenaikan tingkat inflasi namun juga dari kemungkinan perubahan nilai tukar rupiah di masa yang akan datang.

Selain itu, BPKH Limited dalam 2 musim haji terakhir juga telah menjalin kerja sama dengan belasan hotel di Madinah dan Mekkah dalam bentuk pemanfaatan ruang-ruang lain di sekitar gedung, seperti lobi atau ruang strategis lainnya untuk disewakan kepada pelaku UMKM diaspora. Mereka bisa menyewa untuk memanfaatkannya menjadi toko suvenir, kedai produk-produk makanan khas Indonesia seperti Soto Seger Boyolali, Bakso Mang Udin, dan lain-lain. Hal ini dilakukan selain untuk menghadirkan makanan khas Nusantara yang mungkin bisa mengobati kerinduan para jemaah haji merasakan makanan di tanah air, juga tentunya dalam rangka efisiensi dari komponen biaya akomodasi pelaksanaan haji.

Potensi pengembangan usaha di bidang katering dan penyediaan makanan bercita rasa Indonesia juga tidak kalah besarnya baik untuk jemaah haji maupun jemaah umrah di Mekkah dan Madinah. Salah satu implementasi yang telah





dilakukan adalah kerjasama yang telah dilakukan melalui dibukanya restoran masakan Indonesia di *Clock Tower* Mekkah. Upaya ini tentu saja belum cukup, mengingat potensi nilai bisnis yang sangat besar pada industri katering dan penyediaan makanan untuk jemaah haji dan umrah Indonesia. Sektor lainnya yang juga memiliki potensi besar adalah penyediaan jasa transportasi.

Sektor ini adalah satu-satunya bidang usaha yang belum diawali oleh BPKH melalui BPKH limited yang dapat diklaim sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang dimiliki 100% oleh kuasi pemerintah Indonesia. Selain memiliki potensi risiko yang agak lebih tinggi dibandingkan sektor akomodasi dan katering, tidak adanya segmentasi khusus atas moda transportasi yang digunakan jemaah haji dan umrah Indonesia menjadi alasan utama untuk mempertimbangkan ulang investasi yang akan dilakukan pada industri ini.

#### **Dukungan yang Diperlukan**

Jika semua rencana strategis BPKH lewat BPKH Limited terealisasi, dapat dipastikan upaya-upaya ini akan mampu mengembalikan *capital outflows* seperti yang telah digambarkan di atas. Selain itu nilai manfaat yang akan diterima BPKH untuk dikembalikan ke calon jemaah haji juga tentunya akan meningkat. Seandainya pun hanya 10% aliran dana atas belanja haji dan umrah yang keluar tersebut dapat dikembalikan ke Indonesia, sepertinya angka tersebut sudah lebih dari cukup sebagai titik awal.

Paling tidak ada 3 hal dukungan pemerintah yang diperlukan untuk sementara ini agar hal itu dapat tercapai. Pertama, dukungan dalam bentuk kerjasama kenegaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Hal ini sangat penting selain sebagai payung hukum, juga dapat dijadikan landasan utama untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Kementerian atau Otoritas terkait di Arab Saudi. Pekerjaan besar yang bersifat lintas sektoral sangat memerlukan sinergi strategis di bidang kelembagaan baik dengan instansi pemerintah Kerajaan Saudi maupun kementerian di Indonesia.

Yang kedua adalah perlunya penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Kegiatan investasi langsung yang sangat bersentuhan langsung dengan risiko, tidak dapat berjalan secara optimal jika para pengurus BPKH yang ditunjuk

sebagai pengelola tidak didampingi oleh ketentuan dan aturan hukum perundang-undangan yang sesuai.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian hukum atas bentuk pengelolaan keuangan haji ke depannya. Isu keberlangsungan dana haji sebagai dampak perubahan kebijakan pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama RI ke BPKH dapat segera diatasi jika para pengurus meyakini bahwa solusi permasalahan yang telah diinisiasi dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, cita-cita untuk mengubah *capital outflows* menjadi *capital inflows* dapat terealisasi secara bertahap dan sesuai harapan.



# KOLABORASI BPKH & RUMAH ZAKAT

## *Serahkan Bantuan Tanggap Darurat Gempa Bumi di Kabupaten Bandung*

Gempa bumi dengan magnitudo 5 yang mengguncang Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, telah memberikan dampak besar bagi masyarakat setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa terjadi sekitar pukul 09.41 WIB, dan hingga Kamis, 19 September 2024, masih terdapat korban luka, wilayah terdampak signifikan, serta gempa susulan yang terus menghantui.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan dan bantuan bagi warga terdampak, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Rumah Zakat menyalurkan bantuan tanggap darurat. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada Ahad, 29 September 2024, di kantor Kecamatan Kertasari, salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa.

Dalam acara tersebut, hadir Indriayu Afriana, Kepala Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri Kemaslahatan BPKH, *Chief Funding Officer* Rumah Zakat, Bapak Didi Sabir, Camat Kertasari Heri Mulyadi, S.IP. dan Kepala BPBD Kabupaten Bandung Drs. Ukasuska Pujiutama, M.Msi.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 500 paket

*hygiene kit* (terdiri dari handuk, sabun mandi, sampo, dan sabun cuci tangan), 500 paket *kitchen set* (kompor, wajan, centong, dan spatula), Sembako untuk mendukung dapur umum selama 5 hari.

Total bantuan ini ditargetkan dapat menjangkau 2.000 penerima manfaat, yang diharapkan akan meringankan beban masyarakat Kecamatan Kertasari dalam masa pemulihan.

Indriayu Afriana dari BPKH menyampaikan, “Dengan adanya bantuan tanggap bencana ini, semoga dapat membantu masyarakat Kecamatan Kertasari yang terdampak bencana gempa bumi. Kami berharap bantuan ini bisa memberikan sedikit keringanan di tengah musibah yang sedang mereka hadapi.”



# MENGELOLA KEUANGAN HAJI DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN MANFAAT MAKSIMAL



BPKH memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dana setoran haji jamaah, dengan landasan hukum syariah melalui akad wakalah. Dalam akad ini, para jamaah menyerahkan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola dana haji yang telah disetorkan. Mengapa dana setoran ini harus dikelola dan tidak dibiarkan begitu saja? Jika dana setoran awal senilai Rp 25 juta tidak diinvestasikan, nilai dana tersebut tidak hanya tidak produktif, tetapi juga akan tergerus oleh inflasi seiring meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Dana yang dikelola adalah titipan dari para jamaah yang menunggu giliran untuk berangkat haji. Oleh karena itu, BPKH tidak mengejar imbal hasil tinggi yang berisiko besar. Sebaliknya, BPKH berfokus pada penciptaan nilai manfaat yang optimal setiap tahunnya, dengan tetap menjaga keamanan investasi.

Dari dana kelolaan haji senilai Rp166 triliun, BPKH setiap tahun berhasil membukukan imbal hasil sekitar Rp10 triliun. Penggunaan imbal hasil ini tidak hanya untuk subsidi jamaah yang berangkat pada tahun berjalan, tetapi juga dialokasikan untuk jamaah yang masih menunggu. Dalam hal ini, BPKH telah mengembangkan sistem *virtual account*, di mana setiap jamaah yang terdaftar dapat memantau imbal hasil yang mereka peroleh melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini memungkinkan jamaah memeriksa besaran nilai manfaat yang diterima dari dana setoran awal yang telah disimpan.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2018, BPKH telah mengimplementasikan distribusi nilai manfaat ini. Sebagian besar nilai manfaat digunakan untuk mendukung pembiayaan haji jamaah yang berangkat, sementara sisanya dialokasikan untuk jamaah yang masih menunggu. BPKH juga menjelaskan perbedaan antara peran mereka dalam mengelola dana dan tugas Kementerian Agama dalam menyelenggarakan operasional haji.

Dengan terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji dan pengembangan teknologi seperti *virtual account*, BPKH berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana haji dimanfaatkan secara optimal dan transparan.

# FAMIT (Fakta & Mitos)

## Haji dan Umroh Premium Hanya untuk Orang Kaya: Mitos atau Fakta?

**Mitos:** Banyak yang beranggapan bahwa Haji dan Umroh Premium hanya diperuntukkan bagi golongan kaya yang mampu membayar biaya besar.

**Fakta:** Paket Haji dan Umroh Premium memang menawarkan fasilitas unggul dengan harga lebih tinggi, tetapi ini bukan berarti hanya untuk kalangan tertentu. Siapapun yang memenuhi syarat bisa memilih paket ini untuk kenyamanan lebih dalam beribadah.

## Haji dan Umroh Eksklusif: Apakah Hanya untuk Orang Tertentu?

**Mitos:** Haji dan Umroh Eksklusif hanya bisa diakses oleh orang tertentu dengan koneksi khusus.

**Fakta:** Paket ini sebenarnya disediakan agen perjalanan yang menawarkan fasilitas unggul untuk kenyamanan ibadah. Siapa saja dapat memilihnya jika memenuhi syarat dan siap membayar biaya tambahan yang diperlukan.

## Syarat Haji dan Umroh Khusus

Untuk mengikuti Haji dan Umroh Khusus, calon jamaah harus memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental. Kesiapan finansial juga sangat penting, terutama bagi yang memilih paket premium. Selain itu, kesiapan mental dan keimanan yang kuat dianjurkan, bersama dengan kehadiran di pelatihan yang diselenggarakan oleh agen perjalanan guna memahami tata cara ibadah dan mempersiapkan diri dengan baik.

Pentingnya Pengetahuan Sebelum Berangkat

# HAJI & UMROH PREMIUM HANYA UNTUK ORANG KAYA?

Banyak jamaah belum menyadari pentingnya pengetahuan mendalam mengenai tata cara dan makna ibadah. Agen perjalanan sering menyelenggarakan sesi pelatihan untuk memberikan pemahaman ini kepada jamaah.

## Peran Pemandu Ibadah

Pemandu ibadah pada Haji dan Umroh Khusus memiliki peran penting. Mereka bukan sekadar pemandu wisata, tetapi juga pembimbing rohani yang membimbing jamaah melalui setiap tahap ibadah dengan penuh khidmat.

## Pentingnya Pemilihan Agen Perjalanan Terpercaya

Memilih agen perjalanan yang terpercaya adalah langkah penting agar ibadah berjalan lancar. Agen yang baik akan menyediakan fasilitas memadai dan mendukung pelaksanaan ibadah dengan baik.

Saat mempertimbangkan paket Haji dan Umroh Khusus—baik Premium, Eksklusif, atau dengan fasilitas terbaik—penting untuk tetap menomorsatukan esensi ibadah. Paket yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, serta kesiapan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Sebelum memutuskan, pastikan mendapatkan informasi yang akurat dan memilih agen yang terpercaya. Semoga perjalanan ibadah Anda penuh berkah dan kedamaian.





Segenap Insan Badan Pengelola Keuangan Haji  
mengucapkan

*Selamat & Sukses*

atas pelantikan

**MENTERI & WAKIL MENTERI AGAMA**

Republik Indonesia Periode 2024 - 2029

Nasaruddin Umar  
Menteri Agama Republik Indonesia

Romo Muhammad Syafi'i  
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia



[bpkh.go.id](http://bpkh.go.id)



# Lomba Karya Anugerah Jurnalistik BPKH 2024

7 Tahun BPKH Menjaga Amanah,  
Melayani Jemaah Haji Indonesia

## DIPERPANJANG!

Batas Akhir Submit Anugerah Jurnalistik BPKH 2024  
diperpanjang sampai:

**15 November 2024**



[www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id)



@bpkhri



# Lomba Karya Anugerah Jurnalistik BPKH 2024

7 Tahun BPKH Menjaga Amanah,  
Melayani Jemaah Haji Indonesia

## DEWAN JURI

Juri Karya Tulis Feature



**Setri Yasra**

*Pemimpin Redaksi Ten*

Juri Fotografi



**Muhammad Fadli**

Juri Film Pendek



**Ali Ghifari**

*CEO of FMM Studios*



[www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id)



@bpkhri



Muamalat Tower Lantai 15  
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940